

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor (PKB) saat ini, kinerja dari pengujian kendaraan bermotor (PKB) Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut.
  - a. Jumlah uji berkala mengalami penurunan dari tahun 2021 – 2023 dan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang tidak melaksanakan uji berkala.
    - 1).Persentase uji berkala pada wilayah hulu tahun 2021 sebesar 16%, tahun 2022 sebesar 14%, dan tahun 2023 sebesar 11%.
    - 2).Persentase uji berkala pada wilayah tengah tahun 2021 sebesar 63%, tahun 2022 sebesar 53%, dan tahun 2023 sebesar 40%.
    - 3).Persentase uji berkala pada wilayah pesisir tahun 2021 sebesar 31%, tahun 2022 sebesar 27%, dan tahun 2023 sebesar 22%.
  - b. Kendaraan yang tidak lulus uji berkala terbesar terjadi pada tahun 2022 sebesar 216 kendaraan atau 3% dari jumlah kendaraan bermotor wajib uji.
  - c. Kapasitas dari gedung uji saat ini mampu melayani 92 kendaraan per hari. Uji berkala rata-rata per hari tahun 2023 sebesar 25 kendaraan per hari dengan persentase sebesar 27% dari jumlah kendaraan bermotor wajib uji. Kapasitas gedung uji saat ini mampu melayani jika persentase uji berkala sebesar 85% dan 90% dari jumlah kendaraan bermotor wajib uji.
  - d. Peramalan jumlah kendaraan bermotor wajib di Kabupaten Kutai Kartanegara pada 5 tahun mendatang atau tahun 2029 diperkirakan sebesar 22.601 kendaraan.
2. Dalam penentuan lokasi UPTD pengujian kendaraan bermotor (PKB) wilayah hulu dan pesisir dengan metode *Analytical Hierarchy Process*

(AHP) dan *Facility Location Problem*, alternatif lokasi yang terpilih sebagai berikut.

a. Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

- 1). Alternatif lokasi yang terpilih untuk pembangunan UPTD pengujian kendaraan bermotor (PKB) wilayah hulu adalah Kecamatan Kota Bangun dengan nilai sebesar 0,476 dan tingkat konsistensi sebesar 0,01.
- 2). Alternatif lokasi yang terpilih untuk pembangunan UPTD pengujian kendaraan bermotor (PKB) wilayah pesisir adalah Kecamatan Muara Badak dengan nilai sebesar 0,464 dan tingkat konsistensi sebesar 0,01.

b. Metode *Facility Location Problem*

- 1). Alternatif lokasi yang terpilih untuk pembangunan UPTD pengujian kendaraan bermotor (PKB) wilayah hulu adalah Kecamatan Kota Bangun dengan total jarak sebesar 50,7 km.
- 2). Alternatif lokasi yang terpilih untuk pembangunan UPTD pengujian kendaraan bermotor (PKB) wilayah pesisir adalah Kecamatan Anggana dengan total jarak sebesar 219,3 km.

3. *Layout* pada UPTD PKB wilayah hulu dan pesisir terdiri dari fasilitas yang akan dibangun, analisis kecukupan kapasitas gedung pengujian, dan analisis antrian.

a. Fasilitas yang akan dibangun pada UPTD pengujian kendaraan bermotor (PKB) wilayah hulu dan pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari:

- 1). Bangunan gedung pengujian
- 2). Bangunan gedung generator – set, kompresor, dan gudang
- 3). Jalan keluar atau masuk
- 4). Parkir
- 5). Bangunan gedung administrasi
- 6). Bangunan verifikasi administrasi dan cetak hasil pengujian

b. Kecukupan kapasitas gedung pengujian UPTD PKB wilayah hulu dan pesisir dalam kondisi baik hingga 5 tahun mendatang yaitu tahun 2029.

Hal ini ditandai dengan jumlah kendaraan bermotor wajib uji peramalan per tahun pada wilayah hulu sebesar 4972 kendaraan dan pesisir sebesar 8362 kendaraan lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas gedung pengujian per tahun sebesar 21.620 kendaraan.

- c. Berdasarkan hasil analisis antrian pada UPTD PKB wilayah hulu dan pesisir menunjukkan bahwa tidak ada antrian pada UPTD PKB wilayah hulu dan pesisir. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil analisis antrian, dimana pada UPTD PKB wilayah hulu dan pesisir pada ketiga fase pelayanan didapatkan jumlah antrian ( $L_q$ ) lebih kecil dari jumlah antrian yang diharapkan ( $L_s$ ) dan waktu tunggu antrian ( $W_q$ ) lebih kecil dari waktu tunggu antrian yang diharapkan ( $W_s$ ).
4. Kebutuhan sumber daya manusia (penguji) pada wilayah hulu dan pesisir sebagai berikut.
  - a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) wilayah hulu membutuhkan 9 penguji.
    - 1). Pembantu penguji dan penguji pemula sebanyak 4 orang
    - 2). Penguji tingkat satu sebanyak 0 orang
    - 3). Penguji tingkat dua sebanyak 4 orang
    - 4). Penguji tingkat tiga sebanyak 0 orang
    - 5). Penguji tingkat empat sebanyak 0 orang
    - 6). Penguji tingkat lima sebanyak 1 orang
  - b. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) wilayah pesisir membutuhkan 13 penguji.
    - 1). Pembantu penguji dan penguji pemula sebanyak 6 orang
    - 2). Penguji tingkat satu sebanyak 0 orang
    - 3). Penguji tingkat dua sebanyak 6 orang
    - 4). Penguji tingkat tiga sebanyak 0 orang
    - 5). Penguji tingkat empat sebanyak 0 orang
    - 6). Penguji tingkat lima sebanyak 1 orang

## 6.2 Saran

Adapun saran yang dibutuhkan untuk pengembangan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian lebih lanjut mengenai kriteria penentuan lokasi pengujian kendaraan bermotor (PKB).
2. Lokasi terpilih untuk pembangunan UPTD PKB wilayah hulu dan pesisir di Kabupaten Kutai Kartanegara disarankan menggunakan hasil pada analisis *facility location problem*, dikarenakan metode tersebut lebih objektif dan tidak subjektif atau persepsi responden yang memungkinkan terdapat unsur kepentingan.
3. Menindaklanjuti pembangunan UPTD pengujian kendaraan bermotor (PKB) wilayah hulu dan pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berkerja sama dengan Kepolisian untuk upaya penertiban, sosialisasi berupa pemberian edukasi kepada masyarakat atau pemilik kendaraan bermotor wajib uji mengenai penting nya uji berkala bagi kendaraan yang berkeselamatan serta mensoalisasikan pembukaan pelayanan UPTD pengujian kendaraan bermotor wilayah hulu dan pesisir.